



Media: Harian Jogja

Hari: Minggu

Tanggal: 19 April 2020

Halaman: 1

BANSOS PANDEMI

Ratusan Ribuan KK di DIY Bakal Terima Rp600.000/Bulan

Sunartono
sunartono@harianjogja.com

JOGJA—Pemda DIY memastikan sebanyak 125.000 kepala keluarga (KK) DIY mendapatkan alokasi bantuan sosial dalam bentuk tunai dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos) Rp600.000 per bulan. Selain itu warga miskin yang tak masuk dalam daftar Kemensos akan diberikan bansos APBD DIY dan APBD Kabupaten/kota.

Sekda DIY Kadamanta Baskara Aji menjelaskan berdasarkan hasil rapat melalui *video conference* bersama Pemerintah Pusat pada Jumat (17/4), DIY mendapatkan alokasi sebanyak 125.000 KK yang akan mendapatkan bansos senilai Rp600.000 per bulan.

Bansos itu diberikan secara tunai selama tiga bulan yaitu April, Mei dan Juni 2020 melalui penyaluran Kemensos.

WASPADA CORONA

► Halaman 8

Ratusan Ribuan...

"Jadi Rp600.000 kali 125.000 [KK] selama tiga bulan dalam bentuk tunai," katanya Sabtu (18/4).

Data sebanyak 125.000 KK tersebut diperoleh Pemerintah Pusat melalui data terpadu yang selama ini dimiliki Pusat. Tetapi warga miskin yang masuk dalam data tersebut belum mendapatkan bansos seperti Program Keluarga Harapan (PKH).

Dari data yang dimiliki Kemensos, Pemda DIY bersama pemerintah kabupaten/kota segera mencocokkan data untuk mengantisipasi agar tidak ada double KK yang memperoleh bantuan. Terkait dengan syarat verifikasi warga yang berhak menerima bansos ini, bagi warga yang belum terdata akan dikirim Kemensos pada Senin (20/4) pekan depan.

"Data yang dimiliki Kemensos [125.000 KK] ini adalah data lama yang pernah kami kirimkan, tetapi nanti akan ada pencocokan dari bawah [tingkat desa] setelah adanya Covid-19 ini," katanya.

Aji menyatakan melalui Dinsos DIY, pihaknya telah menetapkan target sasaran melalui APBD DIY 2020 dengan jumlah sekitar 76.200 KK seluruh DIY. Data ini merupakan warga miskin yang biasanya mendapatkan bansos di DIY.

Akan tetapi dengan adanya Covid-19 ini tentu ada KK lain yang mungkin sebelumnya tidak masuk dalam sasaran tetapi kemudian bisa menjadi sasaran karena terdampak. KK yang sudah masuk sebagai penerima bansos APBN (dari Kemensos) akan dicoret dari penerima bansos APBD DIY maupun APBD kabupaten dan kota.

Melalui verifikasi ini diharapkan bisa menyasar warga terdampak Covid-19 lebih luas lagi.

Sedangkan warga yang selama ini telah menerima sembako dari program PKH Pusat sebesar Rp200.000 per bulan akan dilakukan penambahan dana hingga Rp600.000 yang diambil dari APBD kabupaten/kota maupun dana desa (*lihat grafts*).

Kepala Dinsos DIY Untung Sukaryadi mengatakan ada kemungkinan beberapa data dari Pusat yang sama dengan 76.200 data warga yang disiapkan Pemda DIY. Mengingat data dari Pusat diperoleh langsung dari kabupaten dan kota. "Hasilnya besok Senin sudah berupa BNBA [*by name by address*] berapa yang akan diintervensi [dilakukan perubahan karena data sama] DIY," ujarnya. (Antara)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 01 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005